Peristiwa Tiga Daerah

Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan

Oleh Abdurrachman Surjomihardjo

Proklamasi kemerdekaan yang diumumkan di Jakarta 17 Agustus 1945, diterima dan ditafsirkan secara berbeda di berbagai daerah. Penerimaan yang berbeda melahirkan tindakan yang seringkali berbeda dengan yang dikehendaki para pemimpin di Jakarta. Abdurrachman Surjomihardjo *membicarakan revolusi sosial yang terjadi di Brebes, Tegal dan Pemalang berdasarkan disertasi* Ph.D *Anton E. Lucas,* The bamboo spear pierces the payung: The revolution against the bureaucratic elite in North Central Java in 1945, *di mana revolusi itu dipergunakan rakyat untuk menghantam elite birokratik setempat.*

Disertasi yang dibicarakan ini, berjudul kiasan "bambu runcing menembus payung" (maksudnya rakyat jelata menyingkirkan *pangreh praja*) mengisahkan bagaimana revolusi menghantam elite birokratik *(pangreh praja)* di kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang, yang semuanya merupakan bagian daerah karesidenan Pekalongan. Selama lima bulan pertama, dari bulan Agustus sampai Desember 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disambut oleh rakyat setempat dengan pengertian dan persepsinya tentang revolusi sosial sebagai lanjutan Proklamasi Kemerdekaan. Dua bulan pertama setelah Proklamasi ditandai oleh peristiwa-peristiwa sambutan rakyat atas pernyataan kemerdekaan itu, sedangkan tiga bulan berikutnya (Oktober, November dan Desember 1945) interpretasi lokal tentang revolusi Indonesia menonjol dalam bentuk konflik antara rakyat dan *pangreh praja* yang ingin mempertahankan *status quo.*

Urutan peristiwa lokal dalam kerangka peristiwa nasional

Bulan Pertama

Tiga hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan, maka untuk pertama kali terjadilah *aksi serentak* para pemuda di Brebes menurunkan bendera Jepang dan menaikkan sang Saka Merah Putih. Di kota Pekalongan, ibu kota karesidenan, residen Jepang, Tokonami Togoki, mengadakan pertemuan dengan keempat bupati dari seluruh karesidenan, para walikota Tegal dan Pekalongan, hakim Suprapto dan jaksa S. Karioatmodjo, para anggota dewan penasehat karesidenan, di antaranya wedana kota dan Kromo Lawi (seorang nasionalis aktivis pergerakan sebelum perang).

Pada tanggal 22 Agustus di Brebes diadakan pertemuan untuk membicarakan Proklamasi Kemerdekaan dengan mengambil tempat di pendopo kabupaten. Sehari kemudian pertemuan itu dilanjutkan di pendopo kawedanan kota Brebes. Sebelas hari setelah Proklamasi di Pekalongan dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) demikian juga di Banyumas. Wakil Brebes dalam pembentukan KNI di Pekalongan ialah Moh. Saleh, yang mewakili Bupati Sarimin Reksodihardjo.

Pengumuman berdirinya Badan Keamanan Rakyat bersamaan dengan konferensi *Pangreh Praja* seluruh Jawa dan Madura di Jakarta.

Bulan Kedua

Kabinet pertama Republik Indonesia (Kabinet *bucho*) dengan 10 menteri dilantik. Lima kabupaten di daerah Priangan secara serentak membentuk KNI, demikian juga di Brebes. Pada tanggal 3 September Lord Louis Mountbatten, panglima tertinggi sekutu di Asia Tenggara, memerintahkan Marsekal Terauchi di Saigon untuk membubarkan Republik Indonesia. Seluruh Wakil residen pengangkatan Jepang dinaikkan menjadi residen Republik Indonesia, terkecuali untuk Jakarta dan Pekalongan.

Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, seorang eks aktivis gerakan nasionalis dan pada waktu itu residen Banyumas mengumumkan daerahnya sebagai bagian Republik. Di Brebes, Badan Kebaktian Rakyat *(Hokokai)* bentukan Jepang dibubarkan. Di Tegal, pertemuan diadakan di ruangan Gereja Katolik dan terjadi pertentangan pendapat antara walikota dan kaum perjuangan tentang keabsahan Proklamasi. KNI Pekalongan mengusulkan agar Mr. M. Besar (wakil residen) diangkat menjadi residen Pekalongan. Pada tanggal 19 September terjadilah rapat raksasa di tanah lapang IKADA Jakarta dengan pidato Presiden Sukarno di tengah ancaman bayonet Jepang. Kekerasan pertama meletus di Surabaya dalam usaha penurunan bendera Belanda yang dikenal sebagai insiden bendera di Hotel Yamato.

Pada tanggal 23 September, Mr. Besar yang telah diangkat menjadi residen Pekalongan mengumumkan "Kemerdekaan Indonesia" di Pekalongan dan seluruh eks pegawai Jepang dinyatakan secara resmi menjadi pegawai Republik Indonesia. Pada tanggal 27 September Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Republik di Pekalongan. Sambutan rakyat Pekalongan yang berpawai menyambut pengumuman Mr. Besar diberitakan sampai tiga kilometer panjangnya. Pada hari yang sama (29 September) pasukan Inggris yang pertama mendarat di Jakarta.

Bulan Ketiga

Pada awal bulan itu dibentuklah Sarekat Sekerja Kereta Api di Pekalongan dan sehari kemudian (3 Oktober) pecahlah pertempuran antara rakyat dengan polisi militer Jepang *(kenpeitai)*, sedangkan waktu itu residen Mr. Besar sedang berunding mengenai penyerahan senjata Jepang kepada pemerintah Republik. 37 korban meninggal di pihak Indonesia, sedangkan di pihak Jepang 17 orang terbunuh. Markas *kenpeitai* dikepung rakyat.

Tanggal 5 Oktober Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk dengan kekuatan sepuluh divisi. Resimen 17 TKR Pekalongan, bersama dengan resimen lain di Semarang, Pati dan Salatiga merupakan bagian dari Divisi ke-IV, yang bermarkas besar di Salatiga di bawah pimpinan Jenderal Djatikusumo. Dalam pada itu pengepungan markas kenpeitai di Pekalongan terus berlangsung. Barulah pada tanggal 6 Oktober para korban diizinkan untuk dimakamkan, dan sore hari *kenpeitai* menyerahkan senjata-senjatanya. Di hari yang sama di daerah kabupaten Tegal sebuah pabrik beras milik orang Tionghoa di Adiwerna dikuasai oleh Rukun Tani dari Ujungrusi. Keesokan harinya lurah desa Cerih, kecamatan Jatinegara, sebelah selatan kota Tegal dikepung oleh massa. Pada waktu itu tentara Jepang dan *kenpeitai* dari markas Pekalongan diangkut ke Banyumas dengan dikawal oleh TKR. Beberapa hari kemudian Lurah desa Cerih di *dombreng* (bahasa lokal yang berarti diarak beramai-ramai) sepanjang 15 kilometer menuju Jatinegara. Camat Jatinegara melarikan diri. Peristiwa itu merupakan tanda pertama permulaan revolusi sosial.

Pada tanggal 10 Oktober, Camat Adiwerna yang sedang berpidato di muka rakyat di desa Lemahduwur dibunuh. Wedana Adiwerna melarikan diri. Toko Oei Tjun Lam di desa Warungpring (Pemalang) dibakar penduduk, dan ini merupakan permulaan revolusi sosial di Pemalang. Sementara itu di Bandung serdadu Jepang dapat menguasai keadaan setelah pertempuran perebutan senjata. Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) Semarang terbentuk.

Sementara itu di Brebes, sekitar pabrik gula Jatibarang terjadi pembunuhan, yang menjalar ke pabrik gula di Pangkah (sebelah Timur Slawi) dan kemudian pembunuhan besar-besaran di kota Slawi sendiri pada sore harinya. Di Tegal Barisan Pelopor mengumumkan agar semua orang Indo Eropa dan

Karesidenan Pekalongan 1945

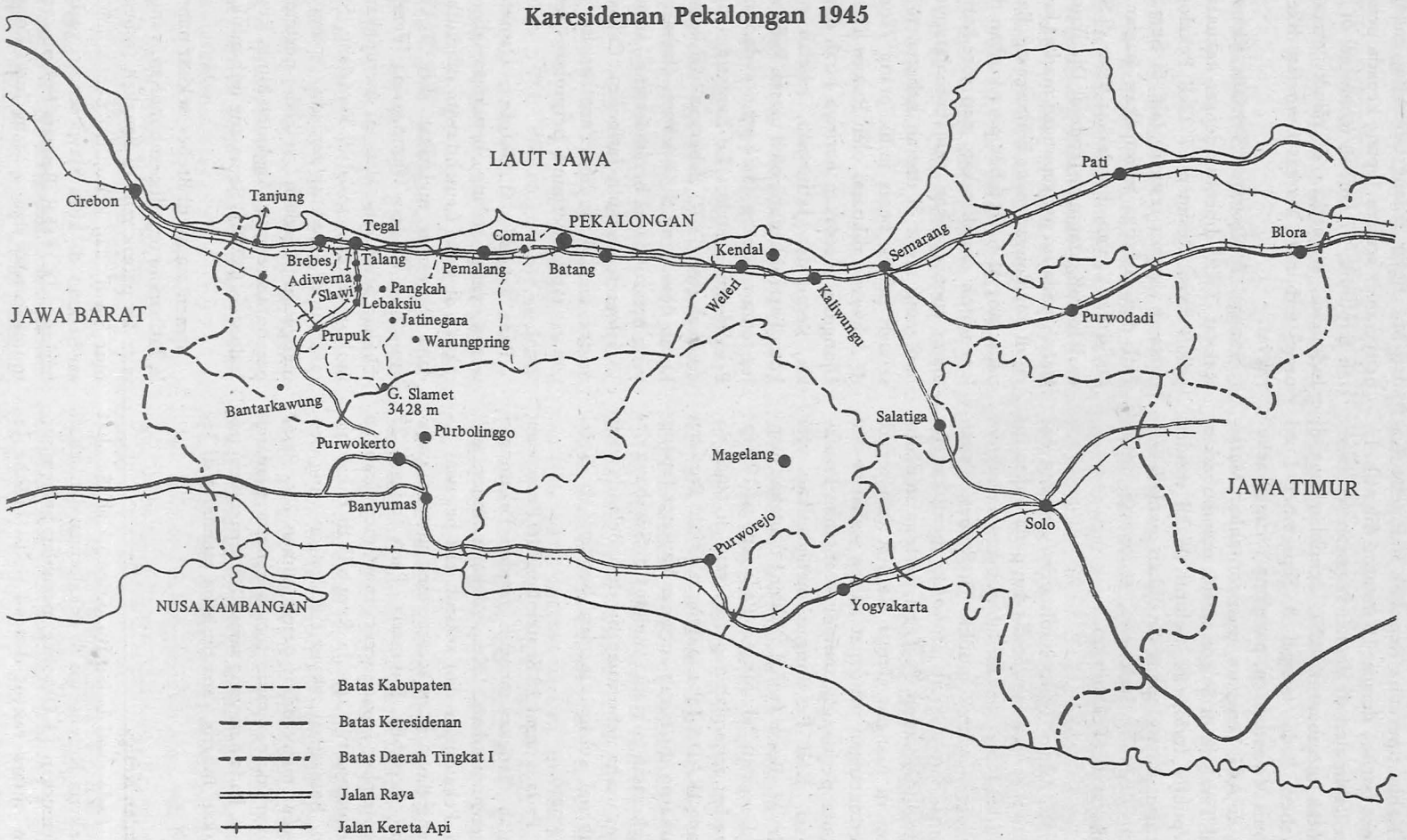

suku-suku bangsa lain yang dianggap pro NICA ditawan.

Wedana Slawi melarikan diri. Camat Moga lari dan dianiaya gerombolan yang marah, tetapi dapat menyelamatkan diri. Camat Lebaksiu (sebelah selatan Slawi) yang sedang naik dokar diturunkan dan dibunuh. Camat Slawi dengan naik sepeda lari menuju Tegal, keluarganya naik andong dan selamat.

Anggota badan perjuangan dari Adiwerna mendatangi markas Angkatan Pemuda Indonesia (API) di sebuah pabrik susu dan ditunjukkan kepadanya adanya telegram (dari mana tidak jelas), yang memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang Indo Eropa dan suku bangsa Indonesia lain. Sementara itu di Brebes dilakukan wawancara bagi mereka yang ingin menjadi TKR. Mr. Wongsonegoro menjadi Gubernur Jawa Tengah. Pembunuhan terhadap keluarga Indo terjadi, termasuk anak kecil berusia 7 tahun di kota Tegal.

Di Semarang pertempuran lima hari meletus, yang menimbulkan ratusan korban baik di pihak Indonesia, maupun di pihak Jepang.

16 Oktober residen Pekalongan mengumumkan untuk pertama kali maklumatnya agar penduduk bersikap tenang dan tertib dan mengancam akan menindak dengan keras mereka "yang melanggar hukum". Di Jakarta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk, yang memiliki kekuasaan legislatif, dan daripadanya dibentuklah Badan Pekerja atau BP-KNIP yang beranggotakan 15 orang. Maklumat residen Pekalongan kedua menyerukan penyerahan senjata dan mesiu kepada polisi. Ratusan pemuda Arab anggota AMRI Pekalongan mengumumkan "sebagai bangsa Indonesia dan akan mempertahankan Indonesia".

Hura-hara sosial meletus di Pemalang

Bupati Brebes dan Patihnya menuju Banyumas dengan maksud mendapat bantuan senjata untuk TKR Brebes. Malam harinya mereka diculik oleh kelompok KNI Tegal, dan bersama dengan Wedana Brebes dan Tanjung, yang juga telah diculik, dibawa ke Tegal. Bupati Pemalang ditangkap bersama priyayi lain dan ditahan di penjara demi keamanannya. Malam itu meletuslah huruhara sosial di kota Pemalang. Pagi harinya (20 Oktober) rapat raksasa di alun-alun Pemalang, Supangat menyatakan diri sebagai bupati Pemalang. Rapat itu dihadiri oleh anggota PKI bawah tanah, yang berpidato juga, yaitu Widarta dan S. Mustapha. Markas polisi Tegal di Kejambon diserbu massa dan dibubarkan.

Tentara Inggris mendarat di Semarang

Maklumat residen Pekalongan ketiga diumumkan pada tanggal 22 Oktober, yang memberi wewenang seluasnya kepada TKR mengambil langkah-langkah yang diperlukan di beberapa tempat di Tiga Daerah untuk mengendalikan kerusuhan. Pengumuman itu disusul dengan perubahan susunan anggota KNI Tegal, dengan menunjuk camat Petarukan sebagai Ketua KNI Persatuan. Tentara Inggris mendarat di Surabaya. Di Yogyakarta Mr. Amir Sjarifudin, eks Gerindo yang kemudian akan menjadi anggota PKI, mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PARSI). Seorang mayor Inggris datang di Pekalongan dari Semarang dengan kesatuan kecil untuk "meninjau tempat tawanan orang asing", diterima oleh residen Mr. Besar dan pejabat komandan TKR Wadyono. Kesatuan Inggris itu kembali ke Semarang di hari yang sama.

Bupati Brebes dan wedana Bantarkawung dengan mata tertutup kain "diperiksa" di desa Ketanggungan. Sementara itu Supangat resmi diangkat oleh residen Pekalongan menjadi bupati Pemalang, demikian juga sekretaris kabupatennya Sujatno. Pada akhir Oktober penduduk Tionghoa di Brebes diberitakan menyumbang 10.000 gulden untuk *Fonds* Kemerdekaan. Dua orang haji diangkat menjadi camat Lebaksiu (haji Toha) dan wedana Adiwerna (haji Mawardi). Sementara itu pertempuran melawan Inggris pecah di Semarang yang menjalar sampai ke Ambarawa.

Bulan Keempat

Presiden Sukarno dan Menteri Amir Sjarifudin terbang ke Semarang, kemudian menuju Magelang dan Yogyakarta pada tanggal 1 November untuk membicarakan situasi militer. Penghentian tembak menembak antar Sekutu dan kekuatan-kekuatan Republik diatur. Presiden Sukarno kembali ke Jakarta dengan kereta api melalui pantai utara, berhenti di Tegal dan berpidato singkat di stasiun, disambut oleh para pemimpin Barisan

Pelopor. Sayuti Melik yang ikut serta dengan Presiden Sukarno meninggalkan rombongan di Tegal.

Konferensi daerah Muhammadiyah berlangsung di Pagongan, lima kilometer sebelah selatan kota Tegal. K.H. Iskandar Idris dan Sayuti Melik ditangkap di dekat Talang dan dibawa ke Slawi. Pada tanggal 4 November Ketua KNI Persatuan dan wedana koordinator Adiwerna yang sedang menuju ke selatan ditangkap dan dibunuh di dekat Talang. Haji Mawardi wedana Adiwerna ditangkap di Talang ketika sedang pulang dari konferensi Muhammadiyah. Menjelang maghrib massa rakyat yang besar memenuhi jalan menuju kota Tegal, sekelompok massa menyerang asrama TKR, menduduki alun-alun, menangkap jaksa Singgih, juga R.M. Abu Bakar dan anaknya yang kemudian dibunuh. Dua orang pemimpin muslim Kyai Mochidin dan Kyai Mochtar ketika sedang menuju Talang untuk menemui pemimpin-pemimpin lokal di situ juga ditangkap. Massa rakyat men-*dombreng* R.A. Kardinah Reksonegoro, kakak R.A. Kartini (ibu mertua bupati Tegal Sunarjo) beserta keluarga ke desa Talang, tetapi dibebaskan kembali. Menurut cerita karena diketahui sebagai pendiri Rumah Sakit "Kardinah" di Tegal, yang banyak pelayanannya kepada para penderita dari sekitar kota.

Badan Pekerja di Brebes dibentuk

Mr. Besar meninggalkan karesidenan. Demikian juga bupati Tegal Sunarjo yang menyamar berpakaian sebagai masinis kereta api dengan dikawal oleh dua pemimpin API, Mansur dari Pangkah dan lainnya. R.M. Suprapto diangkat menjadi pejabat residen Pekalongan tiba di Pekalongan dan mengunjungi kota Tegal. Pemilihan wedana Bumijawa terlaksana. K.H. Abu Sudja'i resmi diangkat menjadi bupati Tegal pada tanggal 8 November oleh pejabat residen Pekalongan. Badan Pekerja di Tegal terbentuk, demikian juga Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Ki Tjitrasatmaka, eks guru Taman Siswa diangkat menjadi Patih Tegal.

Wedana dan Bupati Brebes yang tertutup mata dengan kain dibawa ke penjara Tegal dan "ber-reuni" dengan para Pangreh Praja lainnya.

GBP3D dibentuk

Wedana Pangkah diculik dan dipenjarakan di Pemalang. 14 November Kabinet Sjahrir yang pertama terbentuk. Dua hari kemudian dibentuklah Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D) di markas PARSI di Tegal. 21 November tentara Inggris meninggalkan Magelang menuju Ambarawa, yang sejak tanggal 15 terlibat dalam perang yang hebat dengan TKR dan badan perjuangan lain. Di Brebes diadakan pertemuan GBP3D, dan pada tanggal 30 November H. Mawardi (Wedana Adiwerna), Kyai Bisri dan Kyai Mochidin (yang telah ditangkap tanggal 4 November di Talang) meninggalkan markas AMRI di Slawi dengan diantar pulang oleh Kutil, tukang cukur yang menjadi lambang teror selama peristiwa Tiga Daerah.

Bulan Kelima

Pada tanggal 2 Desember rapat ketiga GBP3D diadakan di kantor PARSI untuk mengatur strategi mengambil alih kekuasaan di Pekalongan dan menetapkan pengiriman ultimatum atas nama Tiga Daerah beserta tuntutan-tuntutannya. Ultimatum itu baru diumumkan tiga hari kemudian, bersamaan hari dengan perebutan kembali Ambarawa oleh pasukan-pasukan Indonesia. Sardjio mengunjungi kota Tegal atas permintaan GBP3D; wedana Brebes dikeluarkan dari penjara Tegal dan menuju markas PARSI. Dua hari kemudian, tanggal 9, konperensi diadakan antara pemimpin-pemimpin GBP3D dengan anggota-anggota Dewan Pertahanan Pekalongan di pendopo kabupaten Pemalang, yang dihadiri juga oleh pejabat residen Pekalongan. Persetujuan dapat dicapai ditandatangani oleh semua golongan dan menunjuk Sardjio sebagai residen.

Siang hari tanggal 10 Sardjio dengan staf dan pengawal tiba di Pekalongan untuk mengambil alih kekuasaan, disusul dengan sebuah upacara dan penyerahan kekuasaan dari pejabat residen Suprapto kepada Sardjio. Rapat raksasa di alun-alun Pekalongan. Sardjio dan K. Midjaja berpidato. Para pemimpin muslim berpawai melakukan protes dengan demonstrasi besar melewati Hotel Merdeka, markas besar Sardjio dan kawan-kawannya di Pekalongan. Pejabat komandan TKR. kembali dari front Semarang melalui markas besar di Salatiga. Pertempuran ber-

kobar di Bekasi, tentara Inggris membakar kota itu.

Sardjio mengunjungi daerah selatan Pekalongan dan disergap ketika pulang di Pekajangan, daerah muslim yang terkenal di Pekalongan. Ia dan K. Midjaja yang terluka dapat meneruskan perjalanan ke Pekalongan tetapi kemudian beserta seluruh staf Tiga Daerah ditangkap dan dipenjarakan. Sehari kemudian (14 Desember) Ambarawa direbut kembali oleh pasukan-pasukan Republik setelah bertempur matian-matian selama 10 hari. Partai Sosialis berdiri di Cirebon.

TKR dan golongan muslim melancarkan penyerbuan secara besar-besaran ke Tiga Daerah. Tanggal 20 pasukan TKR dari Pekalongan memasuki kota Pemalang dan membebaskan tawanan. Para pemimpin Tiga Daerah ditangkap. Sehari kemudian Tegal diduduki. Rombongan Presiden Sukarno tiba di Pekalongan, mengakhiri perjalanannya keliling Jawa dan mengadakan rapat raksasa di alun-alun Pekalongan. Supangat bupati Tiga Daerah dari Pemalang dan beberapa pemimpin PKI bawah tanah Widarta dan Muroso mencoba menemui rombongan Presiden. Mereka ditangkap dan dipenjarakan.

Tanggal 30 Desember setelah rapat raksasa di alun-alun Pemalang Haji Makmur ditunjuk sebagai bupati Pemalang.

Interpretasi tentang Revolusi Sosial

Perubahan politik radikal di Tiga Daerah pada tahun 1945 berakar dalam sebab-sebab ekonomi. Masuknya kapitalisme barat di daerah pesisir utara berpengaruh amat dalam dan luas terhadap petani. Terutama di karesidenan Pekalongan kehadiran 17 pabrik gula sejak paro kedua abad ke sembilan belas mempengaruhi hubungan ekonomi dan sosial di desa-desa sekitarnya. Di daerah pesisir, tempat kehadiran pabrik-pabrik gula, golongan elite birokratik *(pangreh praja)* seringkali terpaksa bertindak sebagai pejabat kaum kapital Eropa. Karena itu dan juga peranannya sebagai penarik pajak dan pelaksana hukum lambat laun memencilkan mereka, dan suatu ketika *pangreh praja* tidak dapat membela kepentingan para petani di satu pihak dan tidak dapat menjadi pegawai kolonial yang baik di pihak lain.

Pendudukan Jepang menyaksikan semakin rapuhnya hubungan "pelindung dan nasabah" *(patron client)* antara *pangreh praja* dan rakyat. Tuan-tuan kolonial yang baru itu menjadikan *pangreh praja* sebagai pengawas-pengawas ekonomi. Walaupun pengaruh sistem penjatahan bahan makanan dan kerja paksa berbeda menurut tempat, tergantung dari sikap pegawai-pegawai lokal dan para pemimpin nasionalis lokal, namun peraturan penyerahan padi merupakan beban yang sama bagi seluruh penduduk. Kepala-kepala desa berperan sebagai tuan-tuan tanah pemungut padi dari para petani. Korupsi terjadi pada semua tingkat sistem itu, yang memaksa karesidenan Pekalongan menaikkan kuota penyerahan padi. Menjelang tahun 1944 mulai timbul bahaya kelaparan, penderitaan yang mengerikan nampak dengan semakin banyak orang yang meninggal karena kelaparan, baik di kota maupun di pedesaan. Penduduk dipaksa makan bekicot dan berbagai macam serabut akar-akaran sebagai bahan makanan terakhir pada masa itu. Para petani dan kaum proletar kota menyalahkan golongan elite birokratik, dan bukannya orang-orang Jepang yang menyebabkan penderitaan itu, terutama karena cara-cara kekerasan dan kesewenang-wenangan mereka mengatur penyerahan padi.

Sebab langsung terjadinya kekerasan selama masa singkat revolusi sosial di bulan Oktober 1945 di Tiga Daerah ialah peranan agresif pangreh praja, terutama dalam hubungan pemungutan hasil panen padi. Pada tahun 1944 terjadi pembunuhan seorang camat, yang sedang melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah, untuk mengetahui para petani yang menyembunyikan hasil panennya dan tidak mau menyerahkan kepada pemerintah. Awal revolusi di daerah itu dimulai dengan kekerasan terhadap golongan Tionghoa, diperkirakan lebih dari 100 orang Eropa terbunuh, dan juga terhadap para pegawai pangreh praja.

Revolusi sosial menyaksikan tumbangnya kekuasaan birokratik di Tiga Daerah. Payung, yang selama ini merupakan lambang kekuatan rohani kaum priyayi, menjadi terkoyak. Elite tandingan, yang menggantikan para wedana dan camat yang terlatih di masa Belanda, kebanyakan ialah. para pemimpin muslim, dan merupakan pertanda terputus-

nya hubungan dengan masa lampau secara mendasar. Di tingkat desa, para *lenggaong*,+ yang merupakan kekuatan sosial pada masa itu, menghancurkan orde lama. Golongan elite agama tetap pada kantornya sampai selesai di tahun 1949 dan kebanyakan dari mereka menjadi pegawai Departemen Agama di daerah itu. Banyak kepala desa yang dipilih rakyat pada masa revolusi sosial bulan Oktober 1945 tetap di posnya sampai dua puluh tahun kemudian.

Sebenarnyalah peristiwa Tiga Daerah merupakan dunia kecil konflik-konflik yang terjadi di permukaan kehidupan politik Indonesia ketika Republik Indonesia lahir. Serangkaian persepsi atau kesadaran revolusioner bersama dirasakan dan berhasil mempersatukan kaum tua radikal aktivis sebelum perang dengan para pemuda, kaum *lenggaong* maupun para pemimpin agama. Revolusi dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh golongan kecil pemuda yang mengenyam pendidikan di kota, namun kesadaran revolusioner itu merupakan paduan dengan bentuk tradisi protes di masa jauh sebelumnya, dan di daerah pedesaan unsur yang menentukan ialah kaum *lenggaong*. Tradisi itu berbeda seluruhnya dengan pandangan-dunia kaum priyayi, yang berpendapat bahwa kepemimpinan revolusi sosial sebagai sesuatu yang asing dan berasal dari luar. Dilihat dari sudut ini apa yang terjadi di Tiga Daerah bisa juga dianggap sebagai permulaan sebuah revolusi kebudayan. Dalam alam pikiran mereka yang bersama-sama memiliki kesadaran revolusioner, itu berarti pula penghapusan hierarki sosial, dan dalam hal itu tanda-tanda pertama dapat diamati dari bahasa yang dipergunakan. Kaum revolusioner menghendaki penghapusan semua sebutan aristokratis bagi kaum priyayi dan berbagai bentuk sopan santun, mereka bicara dengan bahasa Jawa kasar, dan itu merupakan suatu gerakan radikal yang mendasar dalam konteks Jawa.

Apabila pada mulanya beberapa pegawai pangreh praja curiga dan takut terhadap gerakan itu, atau menantang mutlak gerakan itu, tetapi kemudian mereka memahami dan pandangannya berubah agak cepat terhadap kesadaran revolusioner itu. Bekas bupati Brebes, Sarimin, menengok pengalamannya ke belakang pada tahun 1973 dan berkata: "Kami menjadi patriot karena kami diculik pada tahun 1945. Barangkali kalau hal itu tidak terjadi segala sesuatunya akan berkembang ke arah yang lain". Sejak itu Sarimin dikenal sebagai penganut Republik yang tangguh, dan di kemudian hari menjadi gubernur Bali dan kepulauan Nusa Tenggara Barat. Tentu saja beberapa Pangreh Praja ada yang kembali bekerja untuk Belanda ketika daerah pantai utara diduduki Belanda sejak Perang Kemerdekaan Pertama pada tahun 1947. Tetapi banyak yang lain menolak dengan mengungsi ke selatan dan menyokong pemerintah dalam pengungsian serta mendukung kaum gerilya. Revolusi sosial Tiga Daerah membuka jalan bagi banyak anggota elite birokratik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang terkemuka setelah 1945.

Persepsi kaum revolusioner lokal berbeda dengan pemimpin-pemimpin nasional mereka di tahun 1945. Apa yang mereka pikirkan atas tindakan-tindakannya sendiri itu tidak selalu sama dengan hasil-hasil yang mereka capai. Suatu revolusi sesungguhnyalah tidak dapat dipahami tanpa mengkaji motif-motif dan sikap-sikap kaum revolusioner.

Salah satu kekuatan politik yang penting selama Peristiwa Tiga Daerah itu, walaupun tidak dapat diukur secara numerik, ialah gerakan bawah tanah PKI. Pengaruhnya dapat disambungkan secara langsung dengan aktivitas partai itu di zaman pendudukan Jepang. Dilihat dari kepentingannya sendiri,

+ Dalam karangan ini sering dipakai kata *lenggaong*, seorang yang dianggap mempunyai kekuatan jasmaniah, dan pengetahuan kerokhanian yang dalam. Sebelum menjadi *lenggaong* seseorang memerlukan waktu untuk belajar silat dan "ilmu-ilmu dalam". di masa penjajahan ia adalah orang yang terpandang dan disegani oleh penduduk desa, terutama di daerah Pemalang, karena kegiatan-kegiatannya tidak ditujukan kepada penduduk, tetapi kepada administrasi kolonial dan tuan-tuan tanah. Desa di mana banyak terdapat *lenggaong*, oleh pejabat pemerintah disebut *anggaok* (berasal dari burung *gaok* atau gagak).

Di pulau Jawa tiap tempat mempunyai nama sendiri untuk tipe "pendekar desa" itu, seperti kaum *jawara* (Banten), *doreng* (Sunda), *bengseng* (Banyumas), *warok* (Ponorogo), *bromocorah* (Kediri), *bangkrengan* atau *gento* (Tegal) dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia sekarang juga dikenal istilah *jagoan*. Dalam studi Anton E. Lucas ia memakai istilah *lenggaong* untuk seluruh daerah Pekalongan.

seberapa jauhkah derajat sukses yang dicapai PKI? Tujuan pasti dari para pemimpinnya pada tahun 1945 pada pertamanya ialah untuk dapat memegang kekuasaan politik. Mereka menempatkan hal itu sebagai prioritas pertama di atas segalanya termasuk juga pembagian tanah. Sesuai dengan garis perjuangannya tentang front persatuan di tahun 1945 hal itu tidaklah berlawanan. Mundurnya Jepang setelah bertekuk lutut menyertai hancurnya negara. Dengan hanya sejumlah kecil kader yang berdisiplin, mereka tidak ada pilihan lain kecuali ikut serta dengan golongan-golongan yang dianggap merupakan unsur-unsur progresif dengan menggunakan KNI yang ada untuk melaksanakan prioritas pertama mereka,yaitu demokratisasi susunan pemerintahan lokal. Dipandang dari sudut tujuan mereka, sukses-sukses yang mereka capai dengan jumlah kadernya yang kecil sungguh mengagumkan. Badan pekerja yang didirikan oleh PKI di Tegal dan Brebes, yang memerintah kedua kabupaten itu untuk selama enam minggu di bulan November dan Desember 1945, dapat bekerja dan berhasil untuk menghimpun berbagai unsur dalam perjuangan revolusioner. Para bupati muslim yang terpilih secara tidak disengaja di Tegal dan Brebes berguna untuk garis hubungan dengan golongan Islam. Terutama di Brebes, didirikannya Badan Pekerja di tingkat kawedanan dan kecamatan merupakan bukti sukses PKI dalam menjalankan strategi demokratisasi.

Pada umumnya TKR merupakan kekuatan konservatif dalam kehidupan politik Indonesia di tahun 1945. Peristiwa Tiga Daerah dapat dianggap sebagai bentrokan pertama antara golongan militer dan PKI (yang kedua dalam Pemberontakan PKI 1948 dan yang ketiga dalam menghadapi G-30-S/PKI). Empat hari setelah kaum radikal berkuasa, golongan militer untuk pertama kali menunjukkan perannannya mempertahankan "ketertiban" dan *status quo*. Korps perwiranya, dengan kesetiaannya yang mendalam kepada golongan priyayi yang telah ditumbangkan selama revolusi sosial, juga merasa terancam oleh PKI dan golongan muslim radikal di Tiga Daerah. Para bekas opsir PETA dan BKR yang berlatar belakang muslim hanya sebentar menjadi anggota TKR atau birokrasi, dan sedikit di antaranya yang berpengalaman dalam gerakan nasionalis. Jawabannya terhadap situasi revolusi sebagian merupakan hasil pelajarannya di bidang militer yang lebih memperhatikan ketertiban, dan pula sebagian dari mereka adalah hasil pendidikan ideologi Jepang.

Lalu apakah pentingnya Peristiwa Tiga Daerah bagi wilayah Jawa dewasa ini? Banyak di antara perubahan-perubahan administrasi yang semula menjadi tujuan para pemimpin Tiga Daerah sesuai dengan garis strategi demokratisasi, sejak itu terlaksana. Umpamanya saja Batang sekarang (sebelah timur Pekalongan) telah berdiri sebagai kabupaten tersendiri dalam karesidenan, suatu tujuan yang juga dicita-citakan pada waktu itu. Kedudukan wedana yang telah dihapuskan di berbagai tempat pada tahun 1945 sekarang ini juga dihapuskan. Kedudukan wedana sekarang bernama "pembantu bupati". Di Jawa Tengah sekarang, kepala desa dibatasi oleh masa jabatan dan sesudah itu mereka diberi pensiun. PKI dan Islam berlanjut sebagai kekuatan politik lokal yang penting sampai malapetaka 1965. Mungkin sekali kedudukan kedua kekuatan politik itu akan lebih menjadi besar, di tahun seribu sembilan ratus lima puluhan, andaikata mereka tidak memancing pukulan balasan TKR di tahun 1945.

Tetapi lebih daripada yang lain ialah semangat revolusioner yang menyatukan berbagai golongan masyarakat dan begitu berapi-api di bulan Oktober dan November 1945 yang tidak terbatas kepada golongan kecil masyarakat. Seperti sekarang ini sering dikemukakan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidaklah akan berarti apa-apa bila tidak mendapat sambutan semangat revolusioner di kalangan rakyat seluruhnya.

Revolusi sosial membuka unsur-unsur dan nilai-nilai di dalam masyarakat yang selama ini tidak dibolehkan atau tertindas untuk tampil di permukaan. Unsur-unsur itu sulit untuk dirasakan sejak tahun malapetaka 1965, namun mungkin sekali terjadi salah pikir bila hal-hal seperti itu dianggap telah hapus sama sekali.

Akhir drama Tiga Daerah

Sejak serbuan dan penangkapan TKR terhadap Tiga Daerah di minggu ketiga bulan

Desember 1945, 1600 aktivis-aktivis Tiga Daerah ditangkap dan dipenjarakan.

Pada akhir September 1946, 32 orang pemimpin Tiga Daerah mulai diadili, yang memakan waktu lama dan ketidakpastian antara wewenang pengadilan Yogya (tempat tertuduh di penjara) dan pengadilan Pekalongan (tempat terjadinya Tiga Daerah). Sebagian ada yang telah diputuskan hukumannya, sebagian dibebaskan, sebagian lagi masih diadili tetapi kemudian karena aksi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 para pemimpin terpenting mendapat amnesti Presiden Sukarno.

Kutil sendiri, seorang tokoh legendaris dan *lambang* kekerasan dan kekejaman selama Peristiwa Tiga Daerah dijatuhi hukuman mati, yang baru dapat dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1951.

"Revolusi ternyata tidak sanggup mengambil putusan bagaimana sebaiknya menilai Peristiwa Tiga Daerah. Satu-satunya yang dapat disetujui ialah menentukan seorang *lenggaong* sebagai kambing hitam, seorang wakil dari dalam tradisi petani melakukan kekerasan revolusioner," demikian Anton E. Lucas menutup studinya (halaman 406 thesisnya).

Kerangka Disertasi

Urutan peristiwa secara garis besar di atas dan interpretasi Anton E. Lucas yang menyertainya, telah diuraikan dan dianalisa dengan lebih mendetil dalam thesisnya yang dibagi dalam 11 Bab, terdiri dari 411 halaman teks dan kemudian sampai halaman akhir (halaman 488) berisi lampiran-lampiran terjemahan dokumen, sketsa biografi para pelaku sejarah, kronologi, bibliografi dan daftar kata-kata. Disertasi itu juga diperkaya dengan peta dan tabel-tabel dan dua photo otentik dari dalam penjara Wirogunan di Yogyakarta.

Dalam Bab I diuraikan hubungan kaum nasionalis dan elite birokratik di daerah Pekalongan. Latar belakang sosial ekonomi yang buruk menambah suasana keadaan ketidak-puasan ekonomi maupun politik.

Bab II menyusul pengalaman masa pendudukan tentara Jepang dengan politik ekonominya yang menindas kaum tani, pelaksanaan sistem penyerahan hasil panen dan distribusi bahan kebutuhan pokok yang memberi peluang untuk perbuatan korupsi, kerja paksa dan akhirnya reaksi perlawanan petani di beberapa tempat.

Kisah kegiatan oposisi dan perlawanan yang menjadi Bab III menguraikan kejadian di tingkat lokal, kabupaten Pemalang, sistem organisasi dan pembiayannya, sandi-sandi dan persembunyian gerakan bawah tanah.

Setelah Proklamasi didengar dan tersebar luas, maka Bab IV mengisahkan bagaimana jawaban perjuangan kemerdekaan itu mulai dari Barisan Pelopor di Tegal, Pemuda di Tanjung (± 30 sebelah Barat Tegal), pemuda di Pemalang, reaksi pangreh praja setempat dan pembentukan KNI serta nasib orang-orang Jepang di daerah Pekalongan.

Bab V menguraikan jawaban rakyat di pedesaan, muncul kaum *lenggaong*, tumbangnya orde lama di pedesaan, tokoh legendaris dan lambang kekerasan dan kekejaman bernama Kutil, perjuangan kepemimpinan di tingkat desa dan tumbangnya pangreh praja.

Dengan lancar penulis thesis menggunakan penanya tentang hakekat Revolusi Sosial dan korban-korbannya yaitu golongan penduduk yang tidak disukai dan dimusuhi rakyat jelata (Bab VI). Suatu uraian panjang dengan tajuk pokok beraneka yang mengulas tradisi pangreh praja, tradisi protes di kalangan petani, pecahnya revolusi dan permainan perjuangan, bahasa hierarki, gejala *dombreng*, janur kuning dan unsur-unsur revolusioner khusus dan kemudian perspektif kaum priyayi dicakup dalam Bab VII thesisnya.

Bab VIII kembali mengulas jalannya peristiwa di Pemalang, peranan keyakinan agama dan mencari konsensus di antara kaum perjuangan dan akhirnya penulis kembali menguraikan keadaan kabupaten Brebes.

Tiga Bab terakhir membahas aktivitas golongan politik yang mengimbangi situasi revolusioner yang memuncak dengan front persatuan dan pendirian badan-badan persatuan menuju tuntutan akhir mereka: persatuan karesidenan (Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan). Di samping golongan politik muncullah Tentara Keamanan Rakyat, yang terbentuk dengan perbedaan asal-usul para pemimpinnya, pengetahuan dan kewajibannya sehingga akhirnya melancarkan intervensi terhadap kekuatan Tiga Daerah. Menarik sekali ialah sikap pemerintah pusat Republik menghadapi Tiga Daerah, yang

mendorong perjuangan hukum dan politik untuk mempertahankan kewibawaannya. Setelah terjadi perdebatan politik, yang mencoba membela Tiga Daerah, akhirnya tajuk pokok terakhir mengisahkan keputusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap tokoh *lenggaong* (mungkin sekali diorbitkan sebagai lambang belaka).

Akhirnya catatan mengenai bahan sumber yang telah dipergunakan penulis dalam melakukan rekonstruksi sejarah revolusi di tingkat lokal. Dimulai dengan fakta yang didapat dari komunikasi lisan, penulis telah melakukan banyak sekali wawancara dengan para pelaku maupun saksi peristiwa Tiga Daerah. Mereka tersebar di berbagai tempat di Jawa. Ia telah melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan yang relevan. Barulah kemudian ia mengadakan studi arsip pengadilan terhadap tokoh-tokoh Tiga Daerah, yang ternyata tidak tersimpan di Indonesia, tetapi di Algemeen Rijksarchief di Nederland. Mengapa terdapat di luar negeri? Karena ketika Belanda melakukan aksi-aksi militernya, mereka merampas dan memboyong arsip Republik ke negerinya!!!
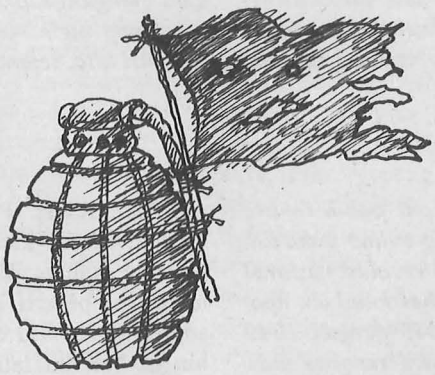
Dengan singkat thesis ini adalah hasil pelaksanaan studi yang luas dan mendalam (exhaustive) dengan metode sejarah lisan, studi literatur dan arsip. Dan kelak akan menjadi pengetahuan umum apabila segera dapat terbit dalam sebuah buku yang final tentang revolusi sosial di awal bulan-bulan pertama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adakah para pembaca juga dapat berharap studi Anton E. Lucas itu akan terbit dalam bahasa Indonesia?